



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAKTI RITONGA**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **75556**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.635.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/55 m2 di ASAHAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 6278 m2 di BATU BARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 2800 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 16000 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 46000 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 652 m2/318 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
9. Tanah Seluas 200 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
10. Tanah Seluas 6000 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
11. Tanah Seluas 110000 m2 di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	578.500.000
1. MOTOR, REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, SUZUKI CDR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 24 G FORTUNER 24 G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.183.152
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.272.683.152
III. HUTANG	Rp.	600.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.672.683.152

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.